PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2019-2023

"Sumatera Selatan Maju Untuk Semua"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan petunjuk-Nya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 003/SE/Bappeda/2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD Tahun 2019-2023).

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran umum pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis,tujuan dan sasaran, Strategis dan arah kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan bidang pengawasan yang mengacu pada sasaran RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi perencanaan kegiatan pengawasan dan pengukuran kinerja setiap tahunnya.

Palembang, 28 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
p SUMATERA SELATAN,

BAMBANG WIRAWAN, SE, MM, Ak,CA, CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19621002198302 1002

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.3.1. Maksud 3

1.3.2. Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi 6

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah..... 11

2.3. Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah 14

2.4 Tantangan dan Peluang 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah..... 26

3.2. Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih..... . 31

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 31

3.4 Penentuan isu-isu Strategis..... 32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah..... 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .. 38

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 48

BAB VIII. PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 15

Tabel T-C-24
Anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat Daerah 22

Tabel T-C-25
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Inspektorat daerah..... 35

Tabel T-C-26
Tujuan, sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan 36

Tabel T-C-27
Rencana Program, Kegiatan, dan pendanaan perangkat Daerah..... 39

Tabel T-C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan sasaran RPJMD..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen penting program dan komitmen Gubernur Sumatera Selatan untuk masa kerja lima tahun ke depan. Untuk mendukung komitmen Gubernur Sumatera Selatan tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019-2023.

Perubahan Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019-2023 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, sehingga Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam RPJMD.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 dan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Bapak H. Herman Deru dan Bapak H. Mawardi Yahya yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun suatu rencana pembangunan di bidang pengawasan sesuai nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan perubahan target dan indicator kinerja berdasarkan capaian realisasi indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, yang pelaksanaannya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai pedoman untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan demikian diharapkan setiap kegiatan dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi, situasi dan kemampuan dana yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 04 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Januari 2020. Tugas Pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah provinsi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka disusunlah Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Inspektur Daerah, Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu wilayah, 1 (satu) Inspektur Pembantu khusus, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di bawah ini diuraikan tugas dan fungsi setiap jabatan sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
d. Pelaporan hasil pengawasan;
e. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
f. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemberian petunjuk koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
b. Pengaturan dan penyediaan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan dari pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
c. Pelaksanaan pemberian petunjuk penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
d. Pelaksanaan pemberian petunjuk urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
e. Pengaturan dan penyediaan penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

f. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pelaporan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu;

g. Pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektorat Daerah Pembantu

Inspektorat Daerah Pembantu terdiri dari :

a. Inspektorat Daerah Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah provinsi. Inspektorat Daerah Pembantu (IRDATU) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

b. Inspektorat Daerah Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat khusus, pengaduan masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut kerugian negara/daerah.

4. Kepala Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1) Merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan dokumen perencanaan dan dokumen pengawasan;

2) Merencanakan penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan;

3) Merencanakan dan mengkoordinasikan penugasan pengawasan Inspektorat Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

4) Mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern pemeriksa;
5) Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan berbasis teknologi informasi;
6) Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
7) Melaporkan dan mengevaluasi hasil pengawasan kinerja Inspektorat Daerah;
8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
1) Menyusun dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2) Melakukan penatausahaan keuangan;
3) Menyusun laporan keuangan; dan
4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1) Membagi tugas dan membimbing bawahan dalam penatausahaan surat menyurat;
2) Mengontrol kearsipan aktif dan in aktif;
3) Merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan, pengadaan dan pengelolaan rumah tangga kantor;
4) Mengontrol pengelolaan barang milik daerah kantor dan barang pakai habis;
5) Mengoreksi penyusunan *draft* Keputusan Gubernur tentang pembagian wilayah kerja kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi;
6) Melakukan urusan kepegawaian;
7) Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

8) Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan).

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

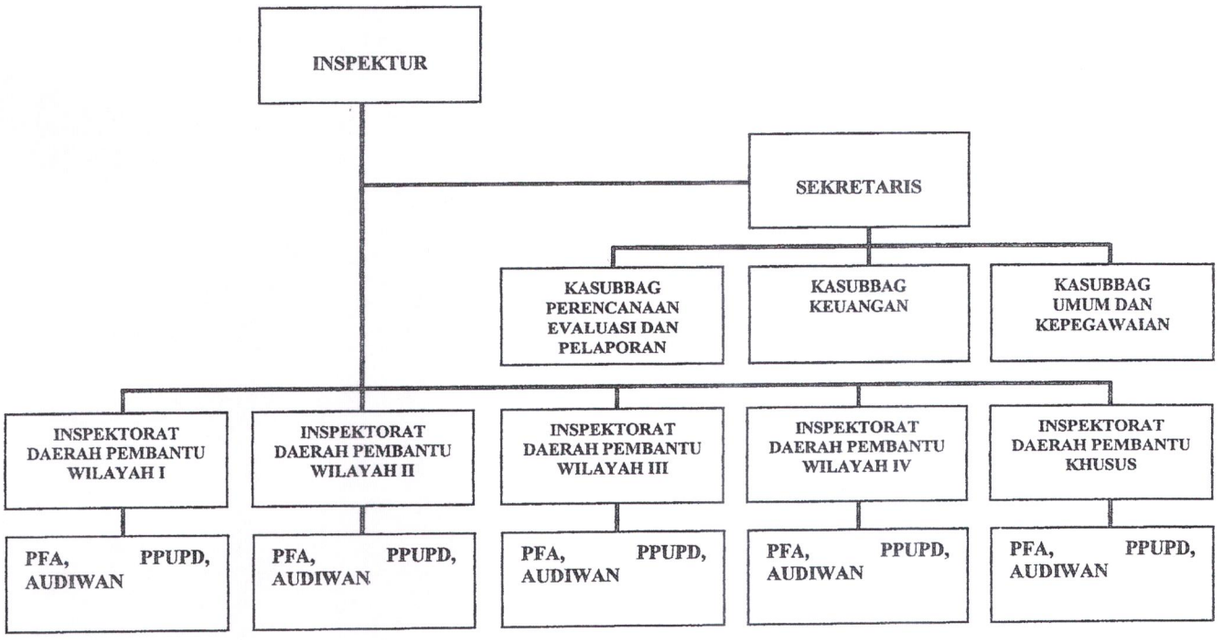

2.2. Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Personil yang bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir bulan Desember 2021 berjumlah 100 orang PNS, yang terdiri atas Laki-laki 54 orang dan Perempuan 46 orang.

Secara rinci komposisi personil Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan alokasi dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel II.1

Tabel II.1

Komposisi Personil berdasarkan Alokasi dan Jenjang Pendidikannya

No	Alokasi	Jumlah (PNS)	Jabatan Struktural/ Fungsional		JENJANG PENDIDIKAN					
				SD	SMP	SLTA	D3	SI	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Struktural	10 org	10 Struktural	-	-	-	-	1	9	-
2.	Tenaga Administratif	17 org	17 Pelaksana	-	-	4	1	7	3	2
3.	Tenaga Teknis	73 org	73 Fungsional	-	-	-	-	36	37	-
	Jumlah	100 org	100 org	-	-	4	1	44	49	2

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel

Komposisi personil berdsarkan disiplin ilmu yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Strata 3 (S3)	: 2 orang
Strata 2 (S2)	: 49 orang
Strata 1 (S1)	: 44 orang
Diploma 3 (D3)	: 1 orang
SLTA	: 4 orang
SLTP	: 0 orang
SD	: 0 orang
JUMLAH	**: 100 orang**

Mengingat begitu luasnya tugas-tugas pengawasan yang harus dilaksanakan, komposisi jumlah APIP yang ada dan jenis disiplin ilmu yang dimiliki, dirasakan masih kurang memadai untuk mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

Sarana untuk menunjang kegiatan Administratif Fungsional dan Teknis Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

1. Ruang Kantor

Gedung utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum cukup memadai sebagai ruang kerja yang representatif, baik untuk kenyamanan bagi aparat pengawasan dalam melaksanakan aktivitasnya di kantor, maupun dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Masih dirasakan adanya kekurangan dikarenakan terdapat beberapa fasilitas penunjang yang belum dimiliki, antara lain ruang rapat para Inspektur Pembantu dan Sekretaris, gudang arsip, dan kantin. Selain itu gedung eks PPD yang menampung sebagian personil Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah digunakan koperasi Bina Praja.

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan dinas roda 4 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berjumlah 13 (tiga belas) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 4 (empat) unit. Kendaraan yang ada saat ini terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Tahun 2020
- 3 (tiga) Unit Minibus Suzuki APV Tahun 2007
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2011
- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Xenia Tahun 2015
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2020
- 4 (empat) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2021
- 1 (satu) Unit Double Cabin KIA Tahun 2000
- 1 (satu) Unit Minibus KIA Pregio Tahun 2000
- 3 (tiga) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tahun 2006/2007
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Tahun 2007
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Tahun 2020
- 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Grande Tahun 2021

3. Sarana Penunjang Operasional Pemeriksaan

Secara ideal setiap pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan harus didukung oleh peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan secara langsung dengan objek yang akan/sedang diperiksa sehingga hasil pemeriksaan benar-benar objektif dan memiliki validitas yang akurat.

Perlengkapan pemeriksaan yang ada saat ini antara lain:

1)	Komputer	= 35 unit
2)	Lap Top	= 44 unit
3)	Printer	= 74 unit
4)	Scanner	= 9 unit
5)	Brangkas	= 6 unit
6)	Kamera	= 3 unit
7)	Handycam	= 1 unit
8)	Meteran (50 m)	= 4 set
9)	Alat test beton	= 2 set
10)	Mesin core drill	= 2 unit

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dirasakan perlunya peralatan-peralatan yang lebih canggih untuk menunjang pelaksanaan tugas dan mendapatkan data hasil pemeriksaan yang cepat dan akurat.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Adapun hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sasaran Renstra periode sebelumnya tercantum pada tabel-tabel berikut ini :

TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel				WTP dengan DPP	WTP dengan DPP	WTP	-	-	WTP dengan DPP	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP	WTP	-	-
2	Persentase SKPD dengan nilai Akuntabilitas Kategori B				75%	80%	95%	-	-	92,68	95	95	-	-	123,57	118,75	100	-	-
3	NIlai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				3,2	3,4	3,4	-	-	2,6802	2,688	2,86	-	-	81,22	96,02	84,11	-	-
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti				87	90	91,75	-	-	88	78	88	-	-	1,01	86,67	96,70	-	-
	1. Badan Pemeriksa Keuangan				88	90	-	73	75 %	78,55	78,65	-	72,25	70,12	89,26	87,39	-	98,97	93,49
	2. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri				94	96	-	-	-	100	95	-	-	-	106,38	98,96	-	-	-
	3. Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis				73	75	-	-	-	98,15	65,76	-	-	-	134,35	87,68	-	-	-
	4. Inspektorat Provinsi				96	98	-	-	-	76,34	73,89	-	-	-	79,52	75,40	-	-	-

5	Persentase SKPD dengan kategori wilayah bebas Korupsi				3	4	4	-	-	2	2	1	-	-	66,67	50	25	-	-
6	Tingkat Maturitas SPIP				-	2	3	-	-	1,62	2,50	3,08	-	-	-	-	-	-	-
7	Level Kapabilitas APIP				-	2	3	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP				12	3	-	-	-	36,59	2,10	-			304,92	70	-		
9	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP kategori "A"				-	-	-	30	50	-	-	-	15,38	10,25	-	-	-	51,26	20,5
10	Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai SAKIP kategori B ke atas				-	-	-	40	50	-	-	-	47	N/A	-	-	-	117,5	94
11	Indeks Integritas Daerah				-	-	-	-	65	-	-	-	-	N/A	-	-	-		65
12	Jumlah perangkat daerah yang diusulkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM				-	-	-	2	1	-	-	-	1	0	-	-	-	50	0
13	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti				-	-	-	95	97 %	-	-	-	84,23	100	-	-	-	88,66	103
14	Skor Maturitas SPIP				-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	3.08	-	-	-	-	90,5
15	Skor Kapabilitas APIP				-	-	-	3	2,7	-	-	-	2	2	-	-	-	66,67	74,07
16	Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasi kan SPI				-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100	-

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Opini Laporan Keuangan**

   Provinsi Sumatera Selatan mulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mendapat Opini WTP.

   Untuk mencapai indikator kinerja tersebut Inspektorat melakukan Reviu Laporan Keuangan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, Proses reviu dilakukan secara parallel dengan proses penyusunan Laporan Keuangan, sehingga apabila terdapat suatu hal yang perlu diperbaiki langsung dapat dikomunikasikan dengan perangkat daerah terkait untuk dilakukan koreksi. Hal ini sebagai bentuk pengawalan sebelum Laporan Keuangan Provinsi Sumsel diserahkan kepada BPK Perwakilan provinsi Sumsel. Sejak Tahun 2016 s.d 2018 Provinsi Sumatera Selatan mendapat opini WTP. Hasil tersebut telah melampau target awal renstra yang ditetapkan yaitu WTP dengan DPP.

2. **Persentase perangkat daerah dengan nilai akuntabilitas kinerja "B".**

   Realisasi PersentasePerangkat Daerah dengan nilai Akuntabilitas kategori **B Tahun 2018** sebesar 37 OPD atau **94,87 %**dengan rincian yaitu OPD dengan nilai Akuntabilitas kategori A sebesar 8 OPD, OPD dengan nilai Akuntabilitas kategori BB sebesar 23 OPD dan OPD dengan nilai Akuntabilitas kategori B sebesar 6 OPD. Hasil tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

   Untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota.Evaluasi kinerja tersebut dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pendekatan komprehensif atas kinerjanya yang telah disusun dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi OPD. Penilaian atas indikator kinerja pada OPD yang lebih penting melihat keselarasan/sinkronisasi dengan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

3. **Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.**

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Tahun 2018 ditargetkan sebesar 91,75 % dan terealisasi sebesar 78,74 %, Hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK, Inpektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri, Inpektorat Jenderal Kementerian Teknis dan Inspektorat Daerah Provinsi.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, meliputi kegiatan pelaksanaan pemantauan dan tindaklanjut terhadap hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan maupun hasil pemeriksaan Perwakilan BPK Provinsi Sumsel. Masih banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh auditan dan sulitnya menangani tindaklanjut hasil pengawasan fungsional tersebut antara lain kurangnya komitmen Kepala Perangkat Daerah/rekanan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihak rekanan yang sulit untuk dihubungi/pindah, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, bukti dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang bersangkutan telah pensiun/sudah meninggal, perubahan

nomenklatur OPD, serta hasil pengawasan yang kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian Daerah/Negara, maupun yang bersifat administratif. Sehingga target yang ditetapkan sulit untuk dicapai.

4. **Skor maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditargetkan mencapai nilai 3 (terdefinisi) dan terealisasi 3,08 (terdefinisi).**

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah Evaluasi SPIP. SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan *(on going basis)* guna mencapai tujuan organisasi. Upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut dengan cara menjaga dan mengamankan aset Daerah/Negara yang dimandatkan kepada pemerintah, menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehatian-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tujuan organisasi, melalui unsur-unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan.

Maturitas Sistem Pengendalian Intern menunjukkan ukuran kualitas dari Sistem Pengendalian Intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi. Pengukuran kualitas sistem pengendalian intern ada 2 (dua) hal yang harus dicapai yaitu aspek desain pengendalian

intern (*control design*) dan kedua adalah aspek penerapannya (*control implementation*).

Capaian indikator skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari hasil pengukuran maturitas sistem pengendalian intern pada Tahun 2017 ditargetkan mancapai level 3.

Capaian indikator skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera SelatanTahun 2018 terealisasi sebesar 3,08 apabila dibandingkan Tahun 2017 sebesar 2,1 sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,98.

Indikator Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada akhir periode Renstra Tahun 2018 sebesar 3, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 3,08, maka realisasi telah melebihi target yang harus dicapai sebesar 0,8.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk lebih meningkatkan realisasi kinerja tersebut:

1) Melakukan Sosialisasi dan Workshop untuk peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mengundang OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3) Membentuk Tim Satuan Tugas peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tim Satgas SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4) Melakukan Tindak Lanjut dan Evaluasi Berkala terhadap hasil penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. **Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).**

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2018 ditargetkan level 3 dan terealisasi pada level 3. Target Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada akhir periode Renstra Tahun 2018 pada level 3, dan terealisasi pada level 3.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut :

1) Mengefektifkan Tim Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2) Membangun Infrastruktur KapabilitasAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektur Daerah Pembantu/Khusus dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektur Daerah Pembantu/Khusus dan Subbag dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3) Meminta asistensi peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

6. **Persentase Perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP**

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 terhadap persentase perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP adalah 16%, dan terealisasi 25 %, sehingga terjadi peningkatan sebesar 156%.

TABEL T-C.24.
ANGGGARAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019,00	2020,00	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16,00	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.544.806**	**1.872.922**	**2.206.200**	**2.879.868**	**2.528.145**	**1.526.354**	**1.731.794**	**2.090.529**	**2.645.661**	**2.454.324**	**98,81**	**92,46**	**94,76**	**91,87**	**97,08**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800	10.800	10.800	10.800,00	5.450	10.700	10.800	9.804	9.880	5.450	99,07	100	90,77	91,48	**100,00**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.370	258.000	199.750	299.308,80	267.030	208.751	157.220	170.331	197.290	235.775	97,38	60,94	85,27	91,48	97,08		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.621	207.232	207.832	315.000	324.985	146.632	188.044	196.884	291.029	313.938	97,35	90,74	94,73	92,39	**96,60**		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	13.200	30.000	33.600	32.000	49.200	13.200	30.000	32.700	28.200	42.000	100	100	97,32	88,13	**85,37**		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	153.631	165.000	165.000	165.000,00	175.000	153.631	163.167	163.167	139.975	174.087	100	98,89	98,89	84,83	**99,48**		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	92.000	115.000	115.000	100.000,00	100.000	92.000	114.600	113.330	99.994	99.893	100	99,65	98,55	99,99	**99,89**		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.000	100.480	117.480	97.480,00	100.000	93.999	100.304	109.285	96.614	99.925	99,99	99,83	93,02	99,11	**99,93**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.720	10.800	10.800	20.000,00	40.000	2.820	10.744	10.795	19.999	40.000	59,74	99,48	99,95	91,48	**100,00**		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.300	15.840	18.300	25.000,00	25.000	18.300	15.840	16.500	21.300	20.160	100	100	90,16	85,20	**80,64**		
Penyediaan Makanan dan Minuman	110.000	128.640	128.640	115.000,00	100.000	106.172	117.122	128.612	97.966	85.855	96,52	91,05	99,98	85,19	**85,86**		
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	256.750	310.440	336.708	435.840,00	468.480	256.750	310.440	336.708	396.600	468.480	100	100	100	91,48	**100,00**		

Penyedia Jasa Tutor SKJ	13.400	8.400	0	0	0	10.500	4.800	0	0	0	78,36	57,14	0	91,48	**0,00**		
Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	378.600	34.440	34.440	44.440,00	97.000	378.500	34.262	17.220	44.436	96.275	99,97	99,48	50	99,99	99,25		
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	-	-	-	176.000	-	-	-	0	174.350	-	-	-	91,48	99,06		
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	34.500	477.850	827.850	1.220.000	600.000	34.500	474.453	785.193	1.202.374	598.136	100	99,29	94,85	91,48	99,69		
Penyediaan Jasa Tim Penilai Daftar Usulan Pengajuan Angka kredit (DUPAK)	-	-	-	43.000,00	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	0,00	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**189.608**	**304.779**	**511.400**	**543.900**	**2.266.395**	**134.795**	**271.822**	**491.039**	**533.497,50**	**2.038.075**	**71,09**	**89,19**	**96,02**	**98,09**	89,93		
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	87.608	111.780	198.900	248.900	689.375	70.826	97.398	197.435	239.927	685.750	80,84	87,13	99,26	96,39	99,47		
Pengadaan Sistem Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	18.000	-	-	1.065.000	-	0	-	-	989.900	-	0	-		92,95		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000	100.000	200.000	150.000	-	-	99.426	199.169	149.542	-	-	99,43	99,58	99,69	-		
Rehab sedang/berat gedung kantor	-	-	-	-	349.520	-	-	-	-	199.925	-	-	-		57,20		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Kantor	82.000	75.000	85.000	70.000	87.500	64.000	74.998	66.935	69.027	87.500	78,01	100	78,75	98,61	100,00		
Pembuatan Instalasi Air gedung Pemprov Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
Sewa Rumah Dinas	-	-	27.500	75.000	75.000	-	-	27.500	75.000	75.000	-	-	100	100,00	100,00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-		**196.185,20**	-	-	-	-	**196.171,90**	-	-	-	-	**99,99**		
Pengadaan Pakaian KORPRI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan pakaian dinas	-	-	-	-	196.185,20	-	-	-	-	196.171,90	-	-	-	-	99,99		
Program Fasilitasi/Purna Tugas PNS	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pemindahan Tugas PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**104.275**	**366.010**	**516.770**	**1.194.300**	**703.906,20**	**102.786**	**258.288**	**454.891**	**975.710,60**	**554.830,80**	**99,38**	**70,57**	**88,03**	**81,70**	**78,82**		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	86.500	241.510	415.020	550.550	256.522,20	85.011	215.980	399.017	547.683,50	243.079,80	98,28	89,43	96,14	99,48	94,76		
Pembekalan Teknis Pengawasan bagi Aparatur Pengawas	17.775	124.500	101.750	125.000	125.000	17.775	42.308	55.873	58.205	66.142,50	100	33,98	54,91	46,56	52,91		
Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	-	-	-	30.750	-	-	-	-	22.363,10	-	-	-	-	72,73	-		
Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	-	-	-	40.700	-	-	-	-	37.769,60		-	-	-	92,80	-		
Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	-	-	-	25.750	87.300	-	-	-	21.369,70	62.973,50	-	-	-	82,99	72,13		
Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	-	-	-	21.550	-	-	-	-	20.189,10	-	-	-	-	93,68	-		
Peningkatan Kapasitas Evaluator SAKIP	-	-	-	400.000	235.084	-	-	-	268.130,60	182.635	-	-	-	67,03	77,69		
Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**1.472.645**	**1.936.770**	**3.360.324**	**4.598.590**	**4.342.266**	**1.463.585**	**1.866.884**	**2.830.182**	**3.676.146,90**	**3,748.229,60**	**99,38**	**96,39**	**84,22**	**79,94**	**86,32**		
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	470.550	399.860	1.017.190	862.950	381.630	470.000	383.417	672.062	576.520	362.055,70	99,83	95,89	66,07	66,81	94,87		
Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Provinsi Sumsel	241.328	280.500	675.800	900.000	916.300	238.013	277.010	574.713	738.062	788.219,30	98,63	98,76	85,04	82,01	86,02		
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	110.000	165.500	220.450	340.000	307.055	106.256	156.197	192.212	305.542,80	210.385,60	96,6	94,41	87,19	89,87	68,52		
Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Audit Khusus Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Bupati/Walikota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Koordinasi Pengawasan ke Kabupaten/Kota se Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	235.700	140.300	85.200	150.380	172.328	235.700	124.690	85.200	150.380	172.328	100	88,87	100	100,00	100,00		
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	367.432	399.900	363.800	355.800	236.350	366.245	390.580	329.310	339.178	235.045,60	99,68	97,67	90,52	95,33	99,45		
Pemeriksaan untuk tujuan tertentu	47.634	550.760	997.884	324.760	1.133.944,40	47.634	534.990	976.685	73.792,20	965.265,70	100	97,14	97,88	22,72	85,12		
Monev Dana desa	-	-	-	451.430	217.300	-	-	-	443.762	191.188	-	-	-	98,30	87,98		
Monev Dana BOS	-	-	-	218.000	234.150	-	-	-	203.913	192.570	-	-	-	93,54	82,24		
Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa	-	-	-	195.000	0	-	-	-	186.400	0	-	-	-	95,59			
Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	-	-	-	-	105.193,60	-	-	-	-	86.875,60	-	-	-	-	82,59		

Reviu penertiban dan pengamanan barang milik daerah	-	-	-	-	98.615	-	-	-	-	89.935	-	-	-	-	91,20		
Survey Penilaian Integritas	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00		
Reviu Dana DAK	-	-	-	-	35.580	-	-	-	-	26.410	-	-	-	-	74,23		
Pembangunan Sistem Integritas Nasional	-	-	-	-	120.870	-	-	-	-	95.250	-	-	-	-	78,80		
Pemeriksaan untuk dana pinjamin	-	-	-	-	382.950	-	-	-	-	332.701.000	-	-	-	-	86878,44		
Pemeriksaan Khusus Dana Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	**280.748**	**437.087**	**1.451.628**	**3.358.443,80**	**1.616.608**	**265.169**	**404.883**	**851.109**	**2.424.450,90**	**1.195.038.186**	**94,45**	**92,63**	**58,63**	**91,48**	**73922,57**		
Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota	280.748	290.800	369.890	250.000	397.030	265.169	268.500	312.793	233.215,40	257.057,50	94,45	91,41	84,56	91,48	64,75		
Evaluasi SPIP	-	-	-	-	136.000	-	-	-	-	15.700	-	-	-	-	11,54		
Operasionalisasi Implementasi peraturan presiden no 87 tahun 2016/ Operasionalisasi sapu bersih pungli	-	143.500	656.613	400.000	502548	-	136.400	215.638	113.517.040,00	449.403,20	-	95,13	32,84	28379,26	89,42		
Reviu Laporan Kinerja	-	-	-	115000	33.220	-	-	-	113.517	33.045	-	-	-	98,71	99,47		
Evaluasi PMPRB	-	-	-	-	101.500	-	-	-	-	101.500	-	-	-	-	100,00		
Penilaian internal Zona Integritas	-	-	-	-	75.350	-	-	-	-	52.450	-	-	-	-	69,61		
Reviu Rencana Strategis	-	-	-	328.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-		

Reviu Rencana Kerja Tahunan	-	-	-	75.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-		
Reviu Indikator Kinerja Utama	-	-	-	225.250	-	-	-	-	133.183	-	-	-	-	59,13	-		
Reviu Penetapan Kinerja	-	-	-	75.000	-	-	-	-	48.300	-	-	-	-	64,40	-		
Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah	-	-	-	200.000	77.100	-	-	-	103.214	73.796,60	-	-	-	51,61	95,72		
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	-	-	-	195.000	-	-	-	-	129.484	-	-	-	-	66,40	-		
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	-	-	-	300.000	79.560	-	-	-	256.993	71.030	-	-	-	85,66	89,28		
Evaluasi Pelayanan Publik	-	-	-	110.000	45.100	-	-	-	106.567,90	28.720	-	-	-	96,88	63,68		
Monitoring dan evaluasi penanganan laporan gratifikasi	-	-	-	40.000	0	-	-	-	32.785	-	-	-	-	81,96	-		
Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	-	-	-	40.000	0	-	-	-	19.297	-	-	-	-	48,24	-		
Monitoring dan evaluasi penanganan WBS				40.000	50.000	-	-	-	36.138	-	-	-	-	90,35	-		
Monitoring dan evaluasi verifikasi LHKPN/LHKASN				40.000	0	-	-	-	31.407,80	-	-	-	-	78,52	-		
Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengawasan responsif gender				0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-		
Pengawalan, pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah				65.493,80	0	-	-	-	56.252,80	-	-	-	-	85,89	-		
Pengawalan implementasi perjanjian kerjasama antara APH dan APIP				500.000	18.900				304.249	18.900	-	-	-	60,85	100,00		
Evaluasi Penerapan SPIP	-	-	82.825	-	-	-	-	64.325	-	-	-	-	74,95	-	-		
Aksi pencegahan korupsi penyelenggaraan SPIP			100.000	100.000	-	-	-	-	95.089	-				95,09	-		
Peningkatan Kapabilitas APIP			100.000	100.000	-	-	-	-	72.553	-				72,55	-		

Evaluasi Kapabilitas APIP	-	-	156.600	-	100.300	-	-	134.039	-	93.435,80	-	-	85,59	-	93,16		
Sistem Integrasi Nasional	-		182.700	-	-	-	-	124.314	-	-	-	-	68,04	-	-		
Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Evaluasi RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pembangunan Sistem Integrasi Nasional	-	-	182.700	-	-	-	-	124.314		-	-	-	68,04	-	-		
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	**30.000**	**40.350**	**38.650**	**57.000**	**87.300**	**28.736**	**36.435**	**13.607**	**42.184**	**39.052,20**	**95,79**	**90,3**	**35,21**	**91,48**	**44,73**		
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	30.000	40.350	38.650	57.000	87.300	28.736	36.438	13.607	42.184	39.052,20	95,79	90,2	35,21	74,01	44,73		
Jumlah	**3.622.083**	**-**	**8.084.973**	**12.632.102,6**	**11.748.305**	**3.521.426**	**-**	**6.731.359**	**10.297.651,8**	**10.233.078,2**	**97,22**	**-**	**83,26**	**81,52**			

Pada umumnya realisasi keuangan selama 5 tahun sudah baik dan berada diatas 90%. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Ada beberapa kegiatan yang realisasinya rendah dikarenakan efisiensi dan perubahan anggaran yang diakhir tahun sehingga menyulitkan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan karena keterbatasan waktu.

Sasaran dan indikator sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicapai dengan 3 (tiga) program tugas pokok dan fungsi, yaitu:

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tantangan :

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peluang :

Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal, yang dipengaruhi oleh :
   a) Tingkat komitmen pejabat/staf yang mengelola sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum maksimal;
   b) Tingkat validasi dan akurasi data capaian kinerja perangkat daerah masih rendah.
2. Masih terdapat catatan-catatan pada opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang dipengaruhi oleh :
   a) Tingkat pemahaman pejabat/staf terhadap Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada perangkat daerah belum maksimal;
   b) Komitmen perangkat daerah dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah masih rendah;
   c) Keterbatasan waktu reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang belum maksimal, yang dipengaruhi oleh :
   a) Pemahaman pejabat/staf pada perangkat daerah terhadap konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih rendah;
   b) Komitmen perangkat daerah dalam konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum maksinal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih periode 2018-2023, yaitu :

"Sumatera Selatan maju untuk semua"

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada misi ketiga, yaitu :

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsive".

Faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih terkait tugas dan fungsi bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Faktor penghambat :

1. Implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum maksimal terutama pada area penguatan pengawasan;
2. Tata kelola keuangan dan manajemen kinerja yang belum optimal;
3. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang masih rendah.
4. Tingkat kapabilitas APIP yang belum pada level optimal.

Faktor pendorong :

Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran jangka menengah Perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2015-2019, yaitu :

1. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
3. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, sebagai berikut :

Faktor-faktor penghambat :

1. Regulasi yang mengatur peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah belum optimal.
2. Implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas keuangan dan kinerja belum maksimal dalam mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Faktor pendorong :

Komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu :

1. Managemen Perubahan
2. Penataan dan penguatan organisasi
3. Penataan Peraturan perundang-undangan
4. Penataan Sumber Daya Manusia
5. Penataan Tata Laksana
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan public

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan di Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Selatan, melalui metode diskusi, maka di tentukan isu-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

2. Peningkatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peningkatan kapabilitas APIP;
4. Penguatan area perubahan reformasi birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan setelah penetapan Visi dan Misi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD perlu di tetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun 5 tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2019-2023 yaitu "Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam area pengawasan". Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan teratur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2019-2023 :

1. Meningkatnya manajemen kinerja yang baik;
2. Meningkatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah;
4. Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik;
5. Meningkatnya kapabilitas APIP.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
							Target yang mengalami Perubahan		
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam area pengawasan	1. Indeks Integritas Daerah 2. Level Maturitas SPIP	Meningkatnya manajemen kinerja yang baik	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP kategori A	30%	50%	35%	40%	50%
				Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai SAKIP kategori B ke atas	40%	50%	35%	35%	37%
			Meningkatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	Indeks Integritas Daerah	60	65	68	68,8	69
				Jumlah perangkat daerah yang diusulkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah
			Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	95%	97%	84%	85%	86%
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	73%	75%	67%	67,5%	68%
			Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik	Level Maturitas SPIP	3,2	3,4	3	3	3
			Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2,5	2,7	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu :

Tabel T.C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Sumsel Maju Untuk Semua			
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsive.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam area pengawasan	Meningkatnya manajemen kinerja yang baik	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP).	Pembinaan dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
	Meningkatnya pembangunan zona integritas	Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu	Membangun percontohan zona integritas pada tingkat

	menuju WBK/WBBM	menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani.	unit kerja.
	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan sistem tata kerja yang transparan dan akuntabel.	Pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.
	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik	Penataan efektifitas pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP berbasis risiko	Evaluasi Penerapan pengembangan SPIP oleh SKPD pada level berkembang
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) yang profesional	Pemenuhan komponen dan infrastruktur leveling kapabilitas APIP dan peningkatan kompotensi APIP.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah dalam dua tahun mendatang, yaitu :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1				Tahun-2					
						2019				2020					
						Target	Realisasi	Rp. (000)	Realisasi	Target	Realisasi	Rp. (000)	Realisasi		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7		-8		-9		-10		-19	-20
Terwujudnya Reformasi Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas				Indeks Reformasi Birokrasi Pengawasan										Inspektorat Daerah	
				Indeks Integritas										Inspektorat Daerah	
	Meningkatnya manajemen kinerja yang baik			Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP kategori A		50%				50%				Inspektorat Daerah	
				Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai SAKIP kategori B Keatas		40%				40%				Inspektorat Daerah	
			Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	**persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi**	**70%**	**70%**		**3.150.000,00**		**70%**		**2.100.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi laporan kinerja di lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel	50 laporan	50 laporan	50 laporan	250.000,00	233.215.400,00	50 laporan	50 laporan	270.000,00	257.057.500		
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	140.000,00	113.517.040,00	1 laporan	1 laporan	160.000,00	33.045.000		
			Reviu Rencana Strategis	Jumlah laporan hasil reviu Renstra	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000,00	263.126.500,00		-		0		
			Reviu Rencana Kerja	Jumlah laporan hasil reviu Renja	1 laporan	1 laporan	-	400.000,00	-	1 laporan	-	400.000,00	0		
			Reviu Indikator Kinerja Utama	Jumlah laporan hasil reviu IKU	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000,00	133.183.000,00		-		0		
			Reviu Perjanjian Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Perjanjian Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000,00	48.300.000,00	1 laporan	-	400.000,00	0		
			Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000,00	103.214.300,00	1 laporan	2 laporan	400.000,00	73.796.600		
			Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Jumlah laporan reviu RPJMD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	129.484.300,00		-		0		
			Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Jumlah laporan hasil reviu RKA SKPD	41 laporan	41 laporan	41 laporan	350.000,00	256.993.586,00	41 laporan	15 laporan	350.000,00	71.030.000		
			Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah yang di evaluasi	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	110.000,00	109.567.959,00	3 perangkat daerah	2 perangkat daerah	120.000,00	28.720.000		
	Meningkatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM			Jumlah perangkat daerah yang diusulkan WBK/WBBM	2	2				2					
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan hasil pengawasan	70%	80%		200.000,00		80%		240.000,00		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah laporan rencana aksi	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.000,00	127.235.600,00	4 laporan	12 laporan	120.000,00	86.875.600,00		
			Survey Penilaian Integritas Tahun 2019	Jumlah laporan hasil survey	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000,00	130.899.200,00	1 laporan	-	120.000,00	-		
			Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	70%	70%		1.550.000,00		70%		1.760.000,00		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Operasionalisasi Sapu Bersih Pungli	Jumlah laporan pencegahan dan penindakan pungutan liar	4 laporan	4 laporan	3 laporan	400.000,00	267.493.572,00	4 laporan	4 laporan	450.000,00	449.403.286,00		
			Evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah laporan evaluasi PMPRB	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000,00	93.382.400,00	1 laporan	1 laporan	120.000,00	101.500.000,00		
			Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah OPD yang sudah berintegritas	2 OPD	2 OPD	2 OPD	60.000,00	25.200.000,00	2 OPD	2 OPD	80.000,00	52.450.000,00		

			Monitoring dan Evaluasi Penanganan Laporan Gratifikasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	40.000,00	32.785.000,00	1 laporan	-	45.000,00	-		
			Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	40.000,00	19.297.600,00	1 laporan	-	45.000,00	-		
			Monitoring dan Evaluasi Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penanganan Whistle Blower System	1 laporan	1 laporan	1 laporan	40.000,00	36.138.000,00	1 laporan	1 laporan	45.000,00	-		
			Monitoring dan Evaluasi Verifikasi LHKPN/LHKSN	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi verifikasi LHKPN/LHKASN	1 laporan	1 laporan	1 laporan	40.000,00	31.407.858,00	1 laporan	-	45.000,00	-		
			Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan responsif gender	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengawasan responsif gender	1 laporan	1 laporan	-	40.000,00	-	1 laporan	-	45.000,00			
			Pengawalan, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengawalan, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000,00	56.252.800,00	1 laporan	-	250.000,00	-		
			Pengawalan Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APH	Jumlah laporan evaluasi PKS APH dan APIP	1 laporan	1 laporan	3 laporan	500.000,00	304.249.018,00	1 laporan	4 laporan	635.000,00	18.900.000,00		
	Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang baik			Persentase penyelesaian temuan hasil pengawasan internal	100%	80%				80%					
				Persentase penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	75,25%	80%				80%					
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Persentase peningkatan hasil pengawasan**	**70%**	**80%**		**2.743.390,00**		**80%**		**2.960.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan	125 LHP	125 LHP	84 LHP	468.300,00	576.520.200,00	125 LHP	9 LHP	565.000,00	362.055.700,00		
			Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Provinsi Sumsel	Jumlah laporan hasil penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	48 laporan	48 laporan	40 laporan	350.000,00	738.062.000,00	48 laporan	43 laporan	370.000,00	788.219.320,00		
			Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen tindak lanjut hasil temuan pengawasan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	200.000,00	305.542.800,00	2 dokumen	2 dokumen	220.000,00	210.385.600,00		
			Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil reviu atas laporan keuangan Pemprov. Sumsel	2 LHR	2 LHR	1 LHR	150.650,00	150.380.000,00	2 LHR	1 LHR	160.000,00	172.328.000,00		
			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di 15	17 LHE	17 LHE	17 LHE	325.000,00	339.178.500,00	17 LHE	15 LHE	330.000,00	235.045.600,00		
			Pemeriksaan untuk Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan untuk tujuan	20 laporan	20 laporan	5 laporan	25.010,00	73.792.200,00	1 laporan	20 laporan	25.000,00	965.265.700,00		
			Monev Dana Desa	Monev dana desa	14 laporan	14 laporan	14 laporan	411.430,00	443.762.000,00	14 laporan	13 laporan	430.000,00	191.188.000,00		
			Monev Dana BOS	Jumlah laporan untuk hasil pemeriksaan untuk dana BOS	14 laporan	14 laporan	14 laporan	218.000,00	203.913.500,00	14 laporan	8 laporan	220.000,00	192.570.000,00		
			Reviu Penyempan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan untuk reviu PBJ	4 laporan	4 laporan	4 laporan	195.000,00	186.400.000,00	4 laporan	-	210.000,00	-		
			Reviu Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan reviu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	300.000,00	298.823.320,00	12 laporan	1 laporan	310.000,00	89.935.000,00		
			Reviu Dana DAK	Jumlah laporan reviu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000,00	101.637.600,00	1 laporan	1 laporan	120.000,00	26.410.000,00		
	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah yang baik			Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP yang baik	3,08	3				3					

			Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	**persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi**	**70%**	**70%**		**100.000,00**		**70%**		**120.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi SPIP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000,00	95.089.200,00	1 laporan	1 laporan	120.000,00	15.700.000,00		
	Meningkatnya kapabilitas APIP			Level kapabilitas APIP	3	3				3					
			Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	**persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi**	**70%**	**70%**		**100.000,00**		**70%**		**120.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Evaluasi Kapabilitas APIP	Jumlah laporan hasil quality assurance dari BPKP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000,00	72.553.400,00	1 laporan	1 laporan	120.000,00	93.435.800,00		
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**100%**	**100%**		**40.250,00**		**100%**		**55.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Penyusunan Dokumen Program kerja Pengawasan Tahunan	Jumlah dokumen Program kerja Pengawasan Tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	40.250,00	42.184.200,00	1 Dokumen	2 Dokumen	55.000,00	39.052.200,00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase administrasi perkantoran yang terlayani**	**100%**	**100%**		**2.290.028,80**		**100%**		**2.500.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/material yang tersedia	150 material/benda pos	150 material/benda pos	143 material/benda pos	10.800,00	9.880.000,00	1500 material/benda pos	748 material/benda pos	11.500,00	5.450.000,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	48 rekening	48 rekening	48 rekening	287.308,80	197.290.373,00	48 rekening	44 rekening	317.500,00	235.775.285,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 kendaraan	11 kendaraan	11 kendaraan	170.000,00	291.029.376,00	11 kendaraan	14 kendaraan	190.000,00	313.937.983,00		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayar	10 Orang	10 Orang	96 OB	42.000,00	28.200.000,00	10 Orang	96 OB	46.000,00	42.000.000,00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan	6 orang	6 orang	2400m2	165.000,00	139.975.000,00	6 orang	1 paket	175.000,00	174.086.602,00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	60 jenis	60 jenis	60 item	100.000,00	99.994.665,00	60 jenis	40 jenis	120.000,00	99.893.050,00		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	30 jenis	30 jenis	30 jenis	97.480,00	96.614.714,00	30 jenis	30 jenis	107.000,00	99.925.000,00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi penerangan kantor yang tersedia	10 unit	10 unit	10 unit	20.000,00	19.999.500,00	10 unit	10 jenis	22.000,00	40.000.000,00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2.640 eksemplar	2.640 eksemplar	2.250 eksemplar	25.000,00	21.300.000,00	2.640 eksemplar	1.742 eksemplar	27.000,00	20.160.000,00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang tersedia	720 orang kali	720 orang kali	614 kali	115.000,00	97.966.318,00	720 orang kali	413 kali	127.000,00	85.855.230,00		
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga honorer yang dibayar	12 orang	12 orang	156 OB	420.000,00	396.600.000,00	12 orang	156 OB	450.000,00	468.480.000,00		
			Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80 laporan	80 laporan	80 laporan	750.000,00	1.202.374.632,00	80 laporan	53 laporan	815.000,00	598.136.184,00		
			Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis	20 jenis	44.440,00	44.436.968,00	20 jenis	15 jenis	47.000,00	96.275.075,00		
			Penyediaan Jasa Tim Penilai Daftar Usulan Pengajuan Angka kredit (DUPAK)	Jumlah penilaian DUPAK yang dibayar	20 orang	20 orang	-	43.000,00	-	20 orang	-	45.000,00	-		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase meningkatnya sarana dan prasarana**	**100%**	**100%**		**843.900,00**		**100%**		**870.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	9 jenis	9 jenis	9 jenis	248.900,00	239.927.688,00	9 jenis	8 jenis	260.000,00	685.750.000,00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	150.000,00	149.542.000,00	1 gedung	1 gedung	165.000,00	199.925.000,00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	10 jenis	10 jenis	10 jenis	70.000,00	69.027.877,00	10 jenis	6 jenis	70.000,00	87.500.000,00		
			Sewa Rumah Dinas	Jumlah rumah yang disewa	1 rumah	1 rumah	1 rumah	75.000,00	75.000.000,00	1 rumah	1 rumah	75.000,00	75.000.000,00		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase peningkatan disiplin aparatur**	**100%**	**100%**		-		**100%**		**220.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**
			Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah ASN yang disiplin dalam berpakaian dinas	100 orang				-	100 orang	200 stel	220.000,00	196.171.985,00		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**100%**	**100%**		**1.282.470,00**		**80%**		**1.500.000,00**		**Inspektorat Daerah**	**Palembang**

			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS dan auditor yang mengikuti sertifikasi dan matrikulasi jabatan fungsional dan teknis pengawasan lainnya	120 orang	120 orang	120 orang	400.350,00	547.683.500,00	120 orang	31 orang	530.000,00	243.079.800,00		
			Pembekalan Teknis Pengawasan bagi Aparatur Pengawas	Jumlah pembekalan teknis pengawasan yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat	3 kali	3 kali	2 kali	100.000,00	58.205.800,00	3 kali	2 kali	120.000,00	66.142.500,00		
			Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	3 orang	30.750	22.363.100	3 orang	-	34.000,00	-		
			Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah aparatur yang mengikuti Capacity Building	3 orang	3 orang	3 orang	40.700	37.769.621	3 orang	-	42.000,00	-		
			Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	3 orang	25.750	21.369.700	3 orang	5 OK	28.000,00	62.973.500,00		
			Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	3 orang	3 orang	3 orang	23.700	20.189.100	3 orang	-	26.000,00	-		
			Peningkatan Kapasitas Evaluator SAKIP	Jumlah evaluator yang mengikuti peningkatan kapasitas SAKIP	50 orang	50 orang	34 orang	661.220,00	268.130.640,00	50 orang	18 OK	720.000,00	182.635.000,00		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan Kinerja dan keuangan yang baik	**100%**					**100%**		**15.000,00**			
				Jumlah laporan capaian kinerja dan Keuangan	6 laporan					6 laporan	5 laporan	15.000,00	7.356.000,00		
			JUMLAH					**12.010.038,80**				**12.160.000,00**			

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023				
								Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp Juta)	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam area pengawasan		**6**	**1**	**1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**%**	**100,00**	**25.677.729.000,00**	**100,00**	**29.954.226.900**	**100,00**	**29.935.520.428**	**100,00**	**85.567.476.327,50**	**Inspektorat**
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun**	**Laporan**	**5 laporan**	**70.240.000**	**3 laporan**	**85.560.000**	**3 laporan**	**85.560.000**	**11**	**241.360.000,00**	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	**Laporan**	5 laporan	70.240.000	3 laporan	85.560.000	3 laporan	85.560.000	11	241.360.000,00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah tenaga administrasi yang dibayar**	**OB**	**430 OB**	**17.402.654.000**	**443OB**	**21.389.841.100**	**443OB**	**21.906.134.628**	**443**	**60.698.629.727,50**	
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	OB	100 ASN	16.653.614.000	1316OB	20.651.741.100	1316 OB	21.168.034.627,500	1316	58.473.389.727,50	
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga honorer administrasi yang dibayar	OB	286 OB	648.960.000	299OB	679.900.000	299 OB	679.900.000	144	2.008.760.000,00	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan dan verifikator yang dibayar	OB	144 OB	100.080.000	144OB	58.200.000	144OB	58.200.000	144	216.480.000,00	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Tenaga administrasi BMD yang dibayar**	OB	**24 OB**	**16.040.000**	**24 OB**	**14.040.000**	**24 OB**	**14.040.000**	**24**	**44.120.000,00**	
					Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	OB	24 OB	16.040.000	24 OB	14.040.000	24 OB	14.040.000	24	44.120.000,00	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai**	**%**	**3 jenis**	**1.890.863.000**	**90%**	**2.282.117.000**	**90%**	**2.282.117.000**	90	**6.455.097.000,00**	

					Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	stel	180 stel	154.000.000	100 stel	200.000.000	100 stel	200.000.000	380	554.000.000,00	
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah PNS/APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	60 orang	1.487.533.000	47 orang	1.715.573.000	47 orang	1.715.573.000	60	4.918.679.000,00	
					Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	kali	3 kali	249.330.000	3 kali	366.544.000	3 kali	366.544.000	9	982.418.000,00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum yang tercapai**	**%**	**7 jenis**	**1.861.950.000**	**90%**	**2.193.625.000**	**90%**	**2.193.625.000**	**90**	**6.249.200.000,00**	
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi penerangan kantor yang tersedia	jenis	10 jenis	50.550.000	10 jenis	55.605.000	10 jenis	55.605.000	10	161.760.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	60 jenis	200.000.000	60 jenis	220.000.000	60 jenis	220.000.000	60	640.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	jenis	15 jenis	60.000.000	15 jenis	66.000.000	15 jenis	66.000.000	15	192.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan yang tersedia	jenis	30 jenis	180.000.000	30 jenis	198.000.000	30 jenis	198.000.000	30	576.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	eksemplar	2160 eksemplar	64.000.000	2160eks	80.000.000	2160eks	80.000.000	2160	224.000.000,00	
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan rapat dan koordinasi	laporan	96 laporan	988.200.000	96 laporan	1.274.020.000	96 laporan	1.274.020.000	288	554000000	
					Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website dan media sosial yang dikelola	jenis	4 jenis	319.200.000	3	300.000.000	3	300.000.000	10	919.200.000,00	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia**	**%**	**3 jenis**	**2.563.778.000**	**95%**	**1.575.911.400**	**95%**	**1.040.911.400**	**95**	**5.180.600.800,00**	
					Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	unit	R4 = 4 dan R2 =2	1.721.060.000	1 unit	535.000.000		-	R4 = 5 dan R2 =2	2.256.060.000,00	
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang tersedia	jenis	3 jenis	365.943.700	4 jenis	400.000.000	4 jenis	400.000.000	7 jenis	1.165.943.700,00	
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	jenis	5 jenis	476.774.300	6 jenis	640.911.400	6 jenis	640.911.400	11 jenis	1.758.597.100,00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang yang tersedia**	**%**	**3 jenis**	**968.320.000**	**100%**	**1.107.980.000**	**100%**	**1.107.980.000**	**100**	**3.184.280.000,00**	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/materai yang tersedia	materai/ benda pos	2400 materai/ benda pos	13.200.000	1452 materai	14.520.000	1452 materai	14.520.000	5304	42.240.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	rekening	48 rekening	405.120.000	48 rekening	498.960.000	48 rekening	498.960.000	48	1.403.040.000,00	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	jenis	4 jenis	550.000.000	33 jasa	594.500.000	33 jasa	594.500.000	33	1.739.000.000,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang milik daerah yang dipelihara**	**%**	**4 jenis**	**903.884.000**	**100%**	**1.305.152.400**	**100%**	**1.305.152.400**	**100**	**3.514.188.800,00**	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	kendaraan	18 kendaraan	503.884.000	17 kendaraan	477.272.400	17 kendaraan	477.272.400	17	1.458.428.800,00	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara	jenis	3 jenis	50.000.000	3 jenis	100.000.000	3 jenis	100.000.000	3	250.000.000,00	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	jenis	6 jenis	150.000.000	4 jenis	150.000.000	4 jenis	150.000.000	6	450.000.000,00	

					Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	unit	1 gedung	200.000.000	1 unit	577.880.000	1 unit	577.880.000	1	1.355.760.000,00	
	1. Meningkatnya manajemen kinerja yang baik, 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan	**6**	**1**	**2**	**Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah**	**%**		**6.423.693.000**	**90,00**	**7.448.140.800**	**90,00**	**7.448.140.800**	**90,00**	**8.567.636.800,00**	**Inspektorat**
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah laporan hasil pengawasan internal**	**laporan**	**4 jenis**	**3.795.893.000**	**236 laporan**	**4.898.960.800**	**236 laporan**	**4.898.960.800**	**472**	**5.476.840.800,00**	
					Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	laporan	119 Laporan hasil pengawasan	1.883.412.000	132 laporan	1.092.421.000	132 laporan	1.092.421.000	383	4.898.960.800,00	
					Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	laporan	35 Laporan hasil pengawasan	969.496.000	51 laporan	1.423.838.000	51 laporan	1.423.838.000	137	3.817.172.000,00	
					Sub Kegiatan Reviu Laporan	Jumlah laporan hasil reviu	laporan	1 LHR	78.517.000	2 laporan	180.378.000	2 laporan	180.378.000	5	439.273.000,00	
					Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	laporan	1 LHR	179.408.000	1 laporan	230.670.000	1 laporan	230.670.000	3	640.748.000,00	
					Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	laporan	28 laporan	269.810.000	45 laporan	1.349.878.800	45 laporan	1.349.878.800	118	2.969.567.600,00	
					Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi TLHP	dokumen	6 dokumen	415.250.000	5 dokumen	621.775.000	5 dokumen	621.775.000	16	1.658.800.000	
					Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu**	**laporan**	**3 jenis**	**2.627.800.000**	**66 laporan**	**2.549.180.000**	**66 laporan**	**2.549.180.000**	**66**	**7.726.160.000**	
					Sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dg tujuan tertentu	laporan	111 Laporan	2.627.800.000	85 laporan	2.199.180.000	66 laporan	2.199.180.000	162	7.026.160.000	
					Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil penyelesaian kerugian negara/daerah	laporan	-	-	40 Laporan	350.000.000	40 Laporan	350.000.000	80	700.000.000	

	1. Meningkatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, 2. Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik, 3. Meningkatnya kapabilitas APIP.	**6**	**1**	**3**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan**	**%**		**1.763.950.000**	**90,00**	**2.610.366.500**	**90%**	**2.610.366.500**	**90,00**	**5.410.061.500,00**	**Inspektorat**
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah laporan hasil fasilitasi Pengawasan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan**	**laporan**	**2 kebijakan**	**95.000.000**	**5 laporan**	**300.090.000**	**5 laporan**	**300.090.000**	**10**	**695.180.000**	
					Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	dokumen	2 dokumen	95.000.000	3 dokumen	300.090.000	3 dokumen	300.090.000	8	1658800000	
					Pendampingan dan asistensi	**Jumlah jenis pendampingan dan asistensi**	**jenis**	**13 pendampingan dan asistensi**	**1.668.950.000**	**12 jenis**	**2.310.276.500**	**12 jenis**	**2.310.276.500**	**12**	**6.289.503.000**	
					Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	laporan	2 Laporan	621.330.000	39 laporan	245.765.000	39 laporan	245.765.000	80	1.112.860.000	
					Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi	laporan	40 Laporan	294.305.000	82 laporan	952.965.000	82 laporan	952.965.000	204	1658800000	
					Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	laporan	3 Laporan	502.800.000	12 laporan	625.980.000	12 laporan	625.980.000	27	1.754.760.000	
					Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi penegakan integritas	laporan	5 laporan	250.515.000	5 laporan	485.566.500	5 laporan	485.566.500	15	1658800000	
						TOTAL			33.865.372.000,00		40.012.734.200		39.994.027.728			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					Target yang mengalami Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat Maturitas SPIP	3,02	3,2	3,4	3	3	3	3
2.	Indeks Integritas Daerah	-	60	65	68	68,8	69	69
3.	Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	95	95	97	84	85	86	86
4.	Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti	71	73	75	67	67,5	68	68

BAB VIII
PENUTUP

Upaya terencana yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berintegritas, sumber dana yang cukup, serta sarana dan prasarana penunjang operasional pemeriksaan yang memadai, dengan komitmen bersama diyakini akan meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara terus menerus, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Kondisi dinamis yang berkembang dalam masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu diantisipasi. Selain itu keseriusan dalam melaksanakan tugas serta didukung dengan perencanaan yang matang dan dilaksanakan dengan sungguh-sunguh sangat diperlukan.

Melalui perencanaan strategis pembangunan pengawasan, diharapkan seluruh ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat bekerja dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan mempedomani Perubahan Rencana Strategis tahun 2019 - 2023.

Demikian perencanaan startegis ini disusun dengan harapan akan menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan perencanaan dengan pengukuran kinerja setiap tahunnya.